

SIARAN PERS
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



PENYERAHAN LKPD UNAUDITED TA 2019
PEMERINTAH KAB BARITO TIMUR, PEMERINTAH KAB BARITO UTARA,
DAN PEMERINTAH KAB KOTAWARINGIN BARAT
KEPADA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, pukul 14.00 WIB, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Barito Timur, Bupati Barito Utara, dan Bupati Kotawaringin Barat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan yang disampaikan terdiri dari 7 (tujuh) jenis, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan bahwa capaian opini selama tiga tahun berturut-turut yaitu LKPD TA 2016-2018 pada ketiga Pemerintah Daerah tersebut yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penilaian yang akan dilakukan dalam rangka pemeriksaan LKPD TA 2019 adalah kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. Kami juga mengharapkan Pemerintah Daerah telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya khususnya yang bisa berdampak pada penyajian Laporan Keuangan, seperti temuan terkait pengelolaan aset tetap, karena jika tidak segera ditindaklanjuti tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi opini, mengingat akumulasi nilainya dapat melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk dapat mempertahankan opini WTP yang selama ini sudah diraih. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan agar Pemerintah Daerah senantiasa berperan aktif meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Laporan keuangan yang telah disampaikan akan diperiksa oleh Tim Pemeriksa untuk diberikan opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berharap agar Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan baik dengan Tim Pemeriksa BPK untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah LKPD diterima oleh BPK. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Informasi Lebih Lanjut
Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Kota Palangkaraya
Telp: (0536) 3241118
Email: palangkaraya@bpk.go.id